

BULETIN ILASPP

Edisi 1, Desember 2025



Editorial

ILASPP: Komitmen Pemerintah Perkuat Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang

Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) bertujuan memperkuat penataan ruang berbasis iklim, menjamin kepemilikan tanah, serta meningkatkan sistem administrasi pertanahan. Proyek ini berlangsung dari 2025 hingga 2029 dan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan pinjaman dari Bank Dunia.

Melalui pelaksanaan lima komponennya, ILASPP mendukung berbagai program, antara lain penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembuatan peta Zona Nilai Tanah (ZNT), pendaftaran tanah ulayat, penegasan batas desa, dan pengembangan peta dasar skala besar.

“

“Proyek ini (ILASPP) bukan proyek ATR/BPN semata. Ini adalah proyek Indonesia. Keberhasilannya akan berdampak langsung pada kepastian hukum, tata ruang yang berkelanjutan, serta peningkatan investasi nasional.”

”

Nusron Wahid

Menteri ATR/Kepala BPN

dalam *Implementation Support Mission*,
April 2025





ILASPP: Komitmen Pemerintah Perkuat Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan perlindungan hak atas tanah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Tata kelola pertanahan yang baik juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat yang akan berujung pada pengurangan kemiskinan.

Untuk itu, *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP) diluncurkan untuk memperkuat penataan ruang berbasis iklim, menjamin kepemilikan tanah, serta meningkatkan sistem administrasi pertanahan. Proyek ini berlangsung dari 2025 hingga 2029 dan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan pinjaman dari Bank Dunia sebesar 653 juta dolar AS.

Pelaksanaan ILASPP mencakup lima komponen yaitu: perencanaan tata ruang berbasis iklim, memperkuat penguasaan lahan dan pengelolaan lanskap, sistem informasi lahan dan penilaian, peta dasar skala besar untuk aksi iklim, dan manajemen proyek dan peningkatan kapasitas.

Untuk memperkuat iklim investasi, proyek ini mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Tujuannya adalah memastikan keterkaitan antara rencana tata ruang dan perizinan usaha, sekaligus menjamin pemanfaatan lahan yang tepat dan berkelanjutan. Selain itu, ILASPP juga mendorong pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai instrumen untuk menentukan nilai tanah di suatu wilayah.

ILASPP juga mendukung diberikannya jaminan hukum atas tanah bagi masyarakat, termasuk pendaftaran tanah ulayat. Melalui pendaftaran tanah untuk berbagai jenis pemanfaatan, ILASPP turut memperkuat perlindungan hak dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Penyediaan peta dasar skala besar dan penetapan batas desa juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang terpadu. Pada akhir pelaksanaan ILASPP, Indonesia diharapkan memiliki peta dasar pertanahan nasional yang terintegrasi, multiguna, dan siap mendukung kebijakan lintas sektor.

RDTR Terintegrasi OSS Perkuat Iklim Investasi dan Kepastian Hukum

Percepatan Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi

Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan ILASPP. RDTR berperan sebagai landasan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang menjadi persyaratan penting dalam proses perizinan berusaha dan investasi.

Integrasi RDTR dengan OSS mendorong percepatan penerbitan izin berusaha yang lebih transparan, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan investor maupun masyarakat. Selain itu, RDTR memastikan kejelasan zonasi (seperti kawasan peruntukan industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata), sehingga pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan investasi.

“RDTR terintegrasi OSS memberikan dampak yang signifikan terhadap proses perizinan. Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha dengan waktu yang lebih cepat,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Bantuan Teknis (Bantek) Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR dalam ILASPP pada akhir Oktober 2025.



Sosialisasi Rencana Bantek Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR dalam ILASPP, 27 Oktober 2025

Per November 2025, dari total 672 RDTR, sebanyak 504 telah terintegrasi ke sistem OSS. Melalui dukungan ILASPP, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyusunan 500 RDTR siap OSS hingga 2028.

Pada 2025, dilaksanakan proses lelang untuk penyusunan 33 RDTR di Pulau Sulawesi, untuk pengerjaan pada 2026. Selain itu, telah dibahas pula usulan lokasi penyusunan RDTR yang proses lelangnya akan diadakan pada 2026.

Untuk mempercepat capaian, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan mendorong RDTR yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk segera diintegrasikan ke dalam sistem OSS.





Pemasangan patok untuk mencegah konflik antar masyarakat dan membantu proses pengukuran oleh petugas

PTSL Terintegrasi: Mengapa Partisipasi Masyarakat Sangat Penting?

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan untuk membangun fondasi data pertanahan berbasis spasial dengan mempercepat proses pengukuran, pemetaan, serta peningkatan kualitas data spasial pada setiap bidang tanah yang telah terpetakan. Melalui program PTSL Terintegrasi, ILASPP memberikan dukungan kepada Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat landasan penyediaan data untuk mewujudkan kadaster multiguna.

Dalam pelaksanaannya, PTSL Terintegrasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, mulai dari pemasangan tanda batas, pengumpulan data fisik dan yuridis, hingga kehadiran saat pengukuran dan penyelesaian administrasi. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat proses, memastikan kelancaran pelaksanaan, serta mendorong keterlibatan yang lebih luas.

Melalui partisipasi masyarakat yang optimal, target PTSL Terintegrasi ILASPP dalam menghasilkan Peta Bidang Tanah (PBT) seluas 4,8 juta hektare pada 2028 diharapkan dapat tercapai. Pada tahun 2025 ini, telah ditetapkan target pengukuran dan pemetaan seluas 682 ribu hektare di 23 kabupaten/kota. Hingga November 2025, telah ditandatangani 96 Kontrak Pesanan untuk pengadaan PBT seluas 597 ribu hektare.

Partisipasi masyarakat dalam PTSL Terintegrasi diawali melalui Gerakan Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas), yang pada Agustus 2025 telah dicanangkan secara serentak di 23 kabupaten/kota, dengan pusat kegiatan di Purworejo, Jawa Tengah. Pemasangan patok akan memudahkan petugas ukur atau satgas fisik pertanahan dalam menjalankan tugasnya, sehingga proses PTSL Terintegrasi dapat berlangsung lebih cepat. Langkah ini juga membantu meminimalkan potensi konflik karena pemohon dan pemilik lahan yang berbatasan telah mencapai kesepakatan sejak tahap pemasangan patok dan pengukuran.

Pengumpulan data fisik dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat bersama penyedia jasa dari perusahaan atau Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB), serta melibatkan masyarakat lokal sebagai Masdasik (masyarakat pengumpul data fisik). Masdasik terdiri dari perangkat desa, babinsa/bhabinkamtibmas, tokoh pemuda, hingga perwakilan perempuan.

Masyarakat di lokasi pelaksanaan PTSL Terintegrasi diharapkan turut berperan aktif dalam mengikuti program yang dibiayai negara ini. Warga diminta menyiapkan berbagai dokumen pendukung, antara lain KTP, surat permohonan PTSL, bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan batas tanah, SPPT-PBB, serta BPHTB.

ILASPP Dukung Pembuatan Peta ZNT Seluas 3,79 Juta Hektare di Tahun 2025

Sistem Informasi Pertanahan dan Penilaian merupakan komponen ketiga dalam pelaksanaan *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP). Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai alat untuk menentukan nilai tanah di suatu wilayah. Keberadaan ZNT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertanahan, mendukung pemerintah dalam perencanaan tata ruang, serta memperkuat efisiensi dan transparansi pasar properti.

Melalui ILASPP, Kementerian ATR/BPN mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan pemetaan ZNT. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) memproyeksikan bahwa dengan dukungan ILASPP hingga 2029, cakupan ZNT akan bertambah 15,9 juta hektare. Dengan demikian, total cakupan ZNT ditargetkan mencapai 59,2 juta hektare atau sekitar 86,5% dari total Area Penggunaan Lain (APL), meningkat dari kondisi sebelum ILASPP yang berada pada angka 63,2%.

Selain memperluas cakupan bagi daerah yang belum ada peta ZNT, kegiatan ini juga bertujuan memperbarui dan memastikan peningkatan kualitas peta ZNT yang sudah ada sebelumnya, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Pihak ke-3 untuk Pembuatan Peta ZNT, 31 Oktober 2025

setelah layanan pertanahan menerapkan ZNT, serta mendukung terwujudnya *single reference of information of land value for multipurposes* atau referensi tunggal informasi nilai tanah multiguna.

Di tahun 2025, ILASPP mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pembuatan peta ZNT seluas 3,79 juta hektare.

Penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga telah dilakukan pada Agustus 2025 untuk pemetaan seluas 2,65 juta hektare dan pada Oktober 2025 untuk pemetaan tambahan seluas 1,13 juta hektare.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 mencakup 20 kabupaten/kota di sembilan provinsi, yaitu Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Pembuatan peta ZNT dengan dukungan ILASPP ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029.





Rapat Koordinasi Teknis ILASPP Penegasan Batas Desa bersama pemerintah daerah, 21 November 2025.

Sinergi ILASPP dan Kemendagri dalam Percepatan Penegasan Batas Desa

Penegasan batas desa sangat krusial sebagai dasar perencanaan pembangunan di desa, pencegahan konflik batas wilayah, kejelasan pemanfaatan ruang, upaya peningkatan investasi, mendukung pendaftaran tanah sistematis lengkap, hingga ketertiban administrasi kependudukan.

Namun, hingga November 2025, baru 10.909 desa atau 14,4% dari 75.266 desa yang telah menetapkan penegasan batas desa. Oleh karena itu, melalui dukungan ILASPP hingga 2029, Kementerian Dalam Negeri menargetkan tambahan 5.000 desa yang memiliki peraturan bupati/wali kota terkait penegasan batas desa.

Pada 2025, ILASPP memfasilitasi penegasan batas di 457 desa yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), serta Kabupaten Donggala dan Toli-Toli (Sulawesi Tengah).

“Menjadi penting adalah menegaskan batas desa, menetapkan batas desa, mengesahkan batas desa dengan Perkada masing-masing. Mudah-mudahan proyek ILASPP ini memantik kita teman-teman provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, dalam Rapat Koordinasi Teknis ILASPP Penegasan Batas Desa bersama pemerintah daerah, pada 21 November 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN selaku Direktur PMU ILASPP, Andi Tenri Abeng, menyampaikan komitmen bahwa PMU ILASPP siap memberikan pendampingan dan bantuan kepada Kemendagri dalam pelaksanaan penegasan batas desa.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penyampaian Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta kepastian penetapan lokasi kegiatan tahun 2026 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

“

Mudah-mudahan optimalisasi pelaksanaan ILASPP 2025 dan pelaksanaan 2026 itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dan menghasilkan keluaran yang terukur, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun tata kelola pembiayaan.”

Andi Tenri Abeng

Kabiro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian ATR/BPN selaku Direktur PMU ILASPP



Selanjutnya, Kemendagri bersama ILASPP melaksanakan sosialisasi penegasan batas desa di tiga kabupaten lokasi kegiatan tahun 2025.



Mama Merry (paling kanan) memfasilitasi praktik lapangan di desa Uluwae untuk bisa menggunakan GPS dan Aplikasi Avenza Maps.

Foto: Landesa Indonesia

Mengukir jejak Perempuan dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Masyarakat adat Suku Karo di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, NTT telah memperoleh status Daftar Tanah Ulayat (DTU) seluas 2,3 hektare pada pertengahan tahun 2025. Capaian ini terwujud melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ngada, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, Landesa Indonesia, serta partisipasi aktif masyarakat Suku Karo.

Salah satu sosok penting dalam didaftarkanya tanah ulayat Suku Karo melalui partisipasi masyarakat adalah Mariana Deso, atau akrab dipanggil Mama Merry. Awalnya, dia bersama beberapa warga Suku Karo lainnya dipercaya mewakili desa untuk mengikuti pelatihan dari organisasi nirlaba, Landesa Indonesia. Dalam pelatihan itu, mereka juga belajar menggunakan alat GPS dan aplikasi Avenza untuk menentukan titik koordinat lahan. Setelah memahami cara penggunaannya, Mama Merry pun turut terjun ke lapangan untuk melakukan pengukuran termasuk penentuan batas tanah.

“Perempuan banyak yang ikut waktu pengukuran. Jadi kami perempuan juga bisa mengetahui batas tanah dan sejarah tanah suku ini,” tutur Mama Merry.

Ia mengaku, setelah tanah ulayat resmi terdaftar, warga merasa lebih tenang dalam mengelola dan memanfaatkan

lahan mereka. Dirinya juga bercerita bahwa masih banyak lahan di desanya yang belum dimanfaatkan. Karena itu, ia ingin membantu mewujudkan rencana pembentukan kelompok tani perempuan agar tanah di desa bisa lebih produktif.

“Kami akan buka ini, lahan untuk tanam jahe dengan kentang. Saya juga ikut di desa. Dari tekad, dari yang ada anggaran untuk ibu-ibu, terus bentuk kelompok,” ujarnya

Bercermin pada dirinya, Mama Merry merasa bersyukur mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang membuatnya lebih berperan nyata bagi desanya. Ia berharap lebih banyak kesempatan untuk pelatihan dan pendidikan, terutama bagi kaum perempuan di desanya.

“Saya berharap supaya mama-mama lain juga diberi kesempatan yang sama. Supaya perempuan juga bisa turun (berperan),” tutupnya dengan senyum lebar.

Dukungan ILASPP dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Pada tahun 2025, Kementerian ATR/BPN dengan dukungan ILASPP melaksanakan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di delapan provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Bali, dan Sumatera Barat.



Project Management Unit (PMU)
Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)

Kementerian ATR/BPN, Jl. Sisingamangaraja No.2, Selong,
Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12110

 pmuilaspp@gmail.com

 [@ilasppproject](https://www.instagram.com/ilasppproject)

 [ilasp project](https://www.facebook.com/ilasp.project)